

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN SEBAGAI BASIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANGLI

Ni Kadek Tasya Novita Devi¹

Ida Bagus Darsana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: tasyanovita33@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor basis dan sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bangli. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan *Overlay*. Berdasarkan analisis data, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat tiga sektor unggulan yang berpotensi atau potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Bangli, diantaranya; 1) sektor pertanian (yang terdiri dari sektor kehutanan dan perikanan), 2) sektor industri pengolahan, dan 3) sektor jasa lainnya. Analisis data dengan LQ terdapat enam sektor basis yang ada di Kabupaten Bangli, diantaranya : 1) sektor pertanian (kehutanan dan perikanan), 2) sektor pertambangan dan penggalian, 3) sektor industri pengolahan, 4) sektor perdagangan besar dan eceran, 5) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, dan 6) sektor jasa lainnya. Dengan hasil analisis tersebut dapat diketahui sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, sehingga pemerintah Kabupaten Bangli dapat menyusun strategi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan agar tepat sasaran.

Kata kunci: sektor basis, sektor unggulan, sektor potensial

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the basic sector and leading sectors that have the potential to be developed in Bangli Regency. The analytical tool used in this study is the analysis technique of Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Growth Ratio Model (MRP), and Overlay. Based on data analysis, the results obtained in this study are three leading sectors that have the potential or potential to be developed in Bangli Regency, including; 1) the agricultural sector (which consists of the forestry and fisheries sector), 2) the manufacturing industry sector, and 3) other service sectors. Data analysis with LQ contained six basic sectors in Bangli Regency, including: 1) agriculture sector (forestry and fisheries), 2) mining and quarrying sector, 3) manufacturing industry sector, 4) large and retail trade sector, 5) sector government administration, defense and social security, and 6) other service sectors. With the results of the analysis, we can find out the sectors that have the potential to be developed, so that the Bangli Regency government can develop a strategy for development planning and decision making to be on target.

Keywords: sector basis, leading sector, potential sector

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki catatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang mengesankan selama dua dekade terakhir (Arsenio, 2003). Hal ini membuktikan Pemerintahan Republik Indonesia telah berhasil menerbitkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil.

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. Tujuan pembangunan ini dapat terwujud apabila didukung oleh tingkat kualitas sumber daya manusia yang baik (Dewi Ardhiyanti, 2016). Ada tiga dasar dalam pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas nasional. Dalam strategi pembangunan pemerintah harus melaksanakan 3 peran penting (i) sebagai penyedia tenaga kerja terampil; (ii) penyedia barang-barang manufaktur dan modal; dan (iii) membeli bahan baku dari berbagai sektor serta menyediakan barang dari sektor primer, dan hasil hutan (Winda, 2017). Dalam ketiga hal yang disebutkan diatas point pertama menjadi sesuatu yang sangat penting yakni menyediakan tenaga kerja terampil. Tenaga kerja merupakan modal atau sumber daya yang dapat menghasilkan barang dan jasa (Bendesa, 2014).

Pembangunan memiliki arti yang luas yakni suatu proses multi dimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000:10). Perubahan dalam struktur ekonomi

atau transformasi struktural ditandai dengan adanya penyesuaian persentase kontribusi berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi (Fattah, 2013). Pembangunan sosial-ekonomi sebagai suatu proses yang dapat diukur dengan indikator seperti PDB, PDRB dan angka harapan hidup (Nowak, 2016). Pembangunan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor geografis (Spolaore dan Wacziarg, 2013).

Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan produksi dan pendapatan, dimana produk yang dimaksud adalah produk suatu daerah yang bernilai ekonomi yang nantinya bisa dijual menjadi pendapatan daerah (Lely, 2013). Pembangunan ekonomi merupakan taraf hidup ekonomi untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan dapat dicapai dengan adanya pembangunan (Wika Mandala, 2015). Sasaran dari pada pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Pelaksanaan pembangunan harus mampu mewujudkan pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh masyarakat (Nugraha, 2013).

Pada beberapa studi tentang pembangunan menganggap kesejahteraan manusia merupakan suatu objek yang harus dipertahankan (Robi Kurniawan, 2018). Dalam proses meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan penghasilan daerah yang merata (Raswita, 2013). Karena kesejahteraan masyarakat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Artana, 2015). Pertumbuhan manufaktur riil, pertumbuhan pertambangan riil, hak

kepemilikan dan hak politik merupakan penentu penting dalam pertumbuhan ekonomi (Mahonye, 2015).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi secara makro dan fungsi kekuatan pasar (Feldman, 2016). Pemerintah dapat menentukan ruang daerahnya dengan jumlah orang yang tinggal di dalamnya, sehingga barang/kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dengan potensi kekayaan yang dibutuhkan untuk menciptakan pasar bagi mereka (Wen-Thai, 2011). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak tumbuh secara bersamaan. Tetapi akan butuh waktu yang berbeda untuk berkembang di setiap daerahnya. Jika pertumbuhan terjadi di satu daerah maka daerah di sekitarnya akan mulai mengikuti pertumbuhan tersebut (Sri Budhi, 2013). Pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat melalui perubahan pada Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan pertumbuhan ekonomi regional dicerminkan dengan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Wiwekananda, 2016). PDRB merupakan nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh orang-orang dan property dari Negara tertentu, untuk jangka waktu satu tahun (Afzal, 2007).

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem Negara kesatuan, aktivitas pemerintahan tidak berada di level pusat, tetapi juga di daerah sebagai pendorong pembangunan daerah dengan menyusun perencanaan pembangunan daerah (Harendhika, 2016). Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting. Dimana hal ini mencerminkan bahwa setiap daerah nantinya dapat meminimalisir kesalahan-kelasahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih

efektif dan efisien (Setianingsih, 2013). Perencanaan pembangunan ekonomi harus didasarkan pada kerangka analisis yang solid yang secara tepat menggambarkan ekonomi lokal (Rowena, 2014).

Pemerintah daerah berperan penting dalam pendekatan strategis untuk mengkonsolidasikan desentralisasi Indonesia (Fitria, 2005). Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan otonomi diberlakukan di Indonesia saat ini memberikan kesempatan besar bagi seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kesuma, 2015). Penerapan otonomi daerah dipusatkan pada pemerintahan kabupaten/kota, dimana pemusatan otonomi daerah (desentralisasi) berada di tangan pemerintah daerah.

Diberlakukannya otonomi daerah menuntut pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/ kota untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kebijakannya demi meningkatkan pertumbuhannya serta pemerintah daerah mampu melaksanakan sendiri didalam penyelenggaraan pemerintahan, menentukan sendiri kebijakan pendanaan serta pembangunan ekonomi wilayahnya (Erawati:2012). Karena pemerintah daerah mengetahui dengan baik potensi dan tantangan yang dihadapi daerah otonomnya. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menganalisis sektor yang menjadi penggerak pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Karena setiap daerah memiliki kondisi daerah dan potensi-potensi yang berbeda, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan daerahnya berbeda satu sama lain (Winda, 2017). Pendekatan sektoral lebih difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor ekonomi melalui

program pengembangan prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah (Arafah Willy, 2017).

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang menjalankan otonomi daerah di Indonesia. Provinsi Bali juga dikenal sebagai daerah pariwisata dilihat dari kondisi alam dan kebudayaan di Bali rupanya membawa dampak positif, karena menarik perhatian wisatawan dalam maupun luar negeri untuk mengunjunginya. Ciri khas kebudayaan di Bali juga sangat disegani oleh para wisatawan. Tingginya kunjungan wisata di Bali tak hanya untuk sekedar berlibur. Tak sedikit dari wisatawan menggali informasi seputar pembangunan di Provinsi Bali yang nantinya dapat meningkatkan niat para wisatawan untuk menjadi investor atau mendatangkan investor luar maupun dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi di Provinsi Bali.

Pemerintah Provinsi Bali dengan gencar melakukan pembenahan maupun pembangunan fisik daerah. Namun proses pembangunan di Bali tidak tertata dengan baik. Gencarnya pembangunan di Bali lebih terpusat di kawasan Bali selatan, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tidak Merata. Selain pemerintah dan investor, peran masyarakat di Bali sangat penting dalam proses pembangunan daerahnya masing-masing. Masyarakat dianggap sebagai penggerak pembanguan daerah, karena memang masyarakat lebih memahami kondisi maupun potensi masing-masing daerahnya. Dalam proses pembangunan daerah perlu adanya sinergi antara pihak pemerintah dengan masyarakat umum agar terciptanya pembangunan yang efektif dan efisien.

Tabel 1.1 menunjukkan besaran PDRB masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan besaran PDRB terendah dari rentan tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Bangli mencapai angka Rp. 3 281,16miliar, dan tiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 4 125,46 miliar pada tahun 2017. Disusul dengan Kabupaten Klungkung dengan besaran PDRB Rp. 4 280,45 miliar, dan sama halnya dengan Bangli, Kabupaten Klungkung juga terus mengalami peningkatan dalam besaran PDRBnya hingga mencapai Rp. 5 388,93 miliar pada tahun 2017. Kabupaten Jembrana juga memiliki besaran PDRB rendah dari Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali, pada tahun 2013 besaran PDRBnya mencapai Rp.6 727,79 miliar dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga mencapai Rp.8 454,05 miliar pada tahun 2017. Meski masuk nominasi 3 PDRB terendah di Provinsi Bali, namun besaran PDRB di tiga Kabupaten ini meningkat setiap tahunnya seperti yang disajikan pada tabel.

Tabel 1.

PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (Dalam Miliar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	6.727,79	7.134,97	7.576,31	8.027,93	8.454,05
Tabanan	11.178,19	11.908	12.644,52	13.420,55	14.143,21
Badung	25.666,53	27.458,06	29.170,24	31.157,37	33.061,42
Gianyar	13.361,4	14.269,42	15.168,55	16.125,28	17.011,48
Klungkung	4.280,45	4.536,35	4.813,39	5.115,61	5.388,93
Bangli	3.281,16	3.472,3	3.686,1	3.916,1	4.125,46
Karangasem	8.002,15	8.482,88	8.991,75	9.524,23	10.008,31
Buleleng	16.587,19	17.741,75	18.818,62	19.950,72	21.028,11
Denpasar	25.026,21	26.778,59	28.422,7	30.273,39	32.114,76
Provinsi Bali	114.103,58	121.779,13	129.137,91	137.192,52	144.964,2

Sumber :BPS Provinsi Bali, 2017

Struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terbagi

dalam tiga pola yaitu : perekonomian daerah yang maju dan tumbuh cepat, terdiri dari Kabupaten Badung; daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng; daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Klungkung; dan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem (Indah Utami, 2014).

Tabel 2 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Terdapat 3 Kabupaten yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah yakni Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Jembrana. Setelah Kabupaten Karangasem dan Jembrana, Kabupaten Bangli termasuk dalam nominasi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 6,90 %. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonominya mencapai 6,24% dan mengalami penurunan pada 2017 mencapai 5,35%. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana ketidak tepatan sasaran kebijakan Pemerintah Daerah dan perencanaan pembangunan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Tabel 2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2013-2017 (%)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
Kab. Jembrana	5,69	6,05	6,19	5,96	5,31	5,84
Kab. Tabanan	6,45	6,53	6,19	6,14	5,38	6,14
Kab. Badung	6,82	6,98	6,24	6,81	6,11	6,60
Kab. Gianyar	6,82	6,8	6,3	6,31	5,5	6,35
Kab. Klungkung	6,05	5,98	6,11	6,28	5,34	5,95
Kab. Bangli	5,94	5,83	6,16	6,24	5,35	5,90
Kab. Karangasem	6,16	6,01	6	5,92	5,08	5,83
Kab. Buleleng	7,15	6,96	6,07	6,02	5,4	6,32
Kota Denpasar	6,96	7	6,14	6,51	6,08	6,53
Provinsi Bali	6,69	6,73	6,03	6,32	5,59	6,27

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2017

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Bangli menurut lapangan usaha 2013-2017 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Rata-rata distribusi PDRB Kabupaten Bangli terbesar pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu 27,55%. Rata-rata distribusi PDRB Kabupaten Bangli terbesar diposisi kedua diduduki oleh sektor penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman yaitu 13,05%, dan diposisi ketiga terdapat sektor Administras Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 11,05% . Rata-rata presentase distribusi PDRB Kabupaten Bangli terkecil terdapat pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 0,03%, diposisi kedua terdapat sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,06 %, dan diposisi ketiga terdapat sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,55% .

Tabel 3.
Distribusi PDRB Kabupaten Bangli Menurut Lapangan Usaha,
2013-2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,49	26,89	27,58	27,82	27,99	27,55
2) Pertambangan dan Penggalian	2,68	2,59	2,45	2,29	2,1	2,42
3) Industri Pengolahan	9,48	9,55	9,87	9,8	9,28	9,60
4) Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6) Konstruksi	8,11	7,59	7,52	7,7	7,76	7,73
7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,78	9,95	9,93	9,95	10,22	9,96
8) Transportasi dan Pergudangan	1,26	1,32	1,33	1,25	1,19	1,27
9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,57	13,48	13	12,96	13,26	13,05
10) Informasi dan Komunikasi	4,22	4,08	4,08	4,07	4,1	4,11
11) Jasa Keuangan dan Asuransi	2,74	2,77	2,77	2,81	2,72	2,76
12) Real Estate	3,32	3,33	3,24	3,11	3,07	3,21
13) Jasa Perusahaan	0,53	0,53	0,55	0,57	0,56	0,55
14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	11,35	11,37	11,04	10,8	10,7	11,05

Wajib						
15) Jasa Pendidikan	2,23	2,26	2,3	2,38	2,42	2,32
16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,39	1,41	1,45	1,47	1,42
17) Jasa lainnya	2,79	2,8	2,84	2,95	3,04	2,78
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber :BPS Kabupaten Bangli, 2017

Pemerintah Kabupaten Bangli dituntut untuk kreatif dalam menyusun perencanaan daerah agar sesuai dengan karakteristik daerahnya (Pramita, 2009). Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pengembangan potensi wilayahnya. Berbagai sektor-sektor ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan cara berbeda. Sehingga pemahaman keunggulan komparatif dari sektor-sektor ekonomi tersebut menjadi sangat penting dalam keputusan pembangunan daerah (Herath, 2010). Dengan demikian perlu diketahui sektor-sektor unggulan yang dimiliki wilayahnya, sehingga dapat ditingkatkan potensinya dan secara efektif dapat menopang pembangunan ekonomi di wilayahnya. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui sektor-sektor unggulan pada suatu wilayah adalah dengan metode Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Model Rasio Pertumbuhan merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan pendapatan suatu sektor di wilayah yang lebih kecil dengan wilayah yang lebih besar.

Konsep penelitian ini menganalisis tentang sektor unggulan di Kabupaten Bangli yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli yaitu PDRB, Sektor-sektor ekonomi dan arah kebijakan pemerintah atau perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangli. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sektor unggulan, PDRB dan perencanaan pembangunan daerah (arah kebijakan pemerintah).

PDRB merupakan suatu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dengan menggunakan pendekatan produksi, sektor ekonomi dalam PDRB dikelompokkan atas 17 unit usaha. Dengan menganalisis PDRB menggunakan alat analisis Location Quotient, MRP dan Overlay, maka akan diketahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis serta berpotensi untuk dikembangkan. Peningkatan PDRB dalam lingkup makro merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. (Bambang, 2008).

Menurut Soeparmoko dalam Erawati (2012), potensi ekonomi suatu wilayah merupakan suatu kemampuan ekonomi wilayah tersebut yang mungkin layak dan berpotensi untuk dikembangkan, sehingga menjadi suatu sumber penghidupan bagi masyarakat di wilayah setempat. Dalam penelitian Ariyasa (2009) di Kabupaten Gianyar, tentang identifikasi sektor unggulan dengan menggunakan alat analisis Location Quotient, Model Rasio Pertumbuhan dan Overlay. Hasil penelitiannya bahwa, sektor ekonomi unggulan, baik dilihat dari pertumbuhan maupun kontribusinya yang dapat ditetapkan sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Gianyar adalah sektor jasa-jasa.

Dengan mengetahui sektor- sektor ekonomi yang menjadi basis dalam suatu wilayah, peran pemerintah sangat besar dalam memberikan suatu kebijakan dan arah pengembangannya. Strategi kebijakan pembangunan sektor unggulan sebagai indikator terpenting yakni meningkatkan perekonomian daerah melalui potensi

sektor basis, meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dan meningkatkan daya saing ekonomi (Mika, 2016).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 3 terendah dari 9 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali adalah Kabupaten Bangli setelah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli juga cenderung lamban.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi *non partisipan*. Metode ini dilakukan dengan mengobservasi data-data yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Bangli dan beberapa *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan pertama, teknik analisis yang digunakan yaitu :

Alat Analisis *Location Quotient* (LQ)

Secara umum, *Location Quotient* digunakan untuk menentukan sektor berpotensi atau tidaknya , yang bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan dalam keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan unggulannya atau potensinya. *Location Quotient* merupakan suatu alat analisis untuk membandingkan jenis kawasan ekonomi lokal terhadap kegiatan ekonomi regional atau nasional (Gemechis, 2008). *Location Quotient* banyak digunakan sebagai cara untuk

mengkategorikan kegiatan ekonomi ke dalam kegiatan "Basis" atau "non-basis" (Glimer, 1989). *Location Quotient* juga merupakan metode tradisional untuk menganalisis pembangunan daerah (Hodgkinson, 2005). *Location Quotient* ini juga digunakan untuk mengetahui kemampuan relatif suatu sektor suatu wilayah terhadap sektor yang sama terhadap daerah yang lebih luas (Provinsi) dimana daerah yang diteliti merupakan bagiannya (Wiwekananda, 2016).

Menurut Suyana Utama (2010, 55) rumus analisis LQ adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{S_i/S}{N_i/N} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

LQ = Location Quotient sektor i wilayah studi (Kabupaten Bangli)

S_i = Pendapatan sektor i di wilayah studi (Kabupaten Bangli)

N_i = Pendapatan sektor i di wilayah refrensi (Provinsi Bali)

S = Pendapatan total di wilayah studi (Kabupaten Bangli)

N = Pendapatan total di wilayah refrensi (Provinsi Bali)

Kriteria:

a) LQ > 1 : unggulan, sektor tersebut produksinya mencukupi kebutuhan wilayahnya

dan ekspor ke daerah lain.

b) LQ < 1 : bukan unggulan, sektor tersebut tidak mencukupi daerahnya untuk itu dibutuhkan bantuan di wilayah lain.

c) LQ = 1 : sektor hanya dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri tetapi tidak

dapat melakukan ekspor ke daerah lain maupun impor ke daerah lain.

Analisis Identifikasi Peran Sektor Usaha di Masa Mendatang

Peranan sektor usaha di masa datang akan dapat di analisis menggunakan metode *Dinamic Location Qvention* (DLQ). prinsip dari DLQ masih sama dengan LQ . Dengan rumus sebagai berikut :

$$DLQ = \left\{ \frac{(1+g_{ik}) / (1+g_k)}{(1+G_i) / (1+G)} \right\}^t \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

DLQ = *Dinamic Location Qvention*

g_{ik} = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi (Kab. Bangli)

g_k = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor di wilayah studi (Kab. Bangli)

G_i = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah refrensi (Provinsi Bali)

G = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB di refrensi (Provinsi Bali)

T = Jumlah tahun yang akan di analisis

Kriteria:

- a) Apabila nilai *Dinamic Location Qvention* (DLQ) = 1, berarti potensi pertumbuhan wilayah sektor i terhadap potensi peningkatan PDRB Kabupaten Bangli sama dengan potensi pertumbuhan suatu sektor pada Provinsi Bali.
- b) Apabila nilai jika $DLQ < 1$, maka potensi pertumbuhan sektor i terhadap potensi pertumbuhan peningkatan PDRB Kabupaten Bangli lebih kecil

di bandingkan potensi pertumbuhan peningkatan sektor tersebut pada Provinsi Bali.

- c) Apabila $DLQ > 1$, maka potensi pertumbuhan daerah sektor i terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangli lebih cepat dibandingkan potensi pertumbuhan pada Provinsi Bali.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

MRP yaitu suatu alat yang dipakai untuk membandingkan pertumbuhan pendapatan suatu sektor di wilayah yang lebih kecil dengan wilayah yang lebih besar. Model Rasio Pertumbuhan memiliki nilai lebih kecil, lebih besar atau sama dengan satu. Alat ini terbagi menjadi dua (Suyana Utama, 2010:63-64) yaitu:

Rasio pertumbuhan wilayah studi (Rps)

Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan sektor i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan pendapatan sektor i di wilayah referensi.

$$RPs = \frac{\Delta Y_{ij}/Y_{ij}(t)}{\Delta Y_{in}/Y_{in}(t)} \dots \dots \dots (3)$$

- ΔY_{ij} = Perubahan PDRB sektor i di wilayah studi (Kabupaten Bangli)
- $Y_{ij}(t)$ = PDRB sektor i di wilayah studi pada awal penelitian (Kabupaten Bangli)
- ΔY_{in} = Perubahan PDRB di wilayah referensi (Provinsi Bali)
- $Y_{in}(t)$ = PDRB sektor i di wilayah referensi pada awal periode (Provinsi Bali)
- RPs = Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan sektor ke-i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan perkembangan total PDRB di wilayah referensi.

Rasio pertumbuhan wilayah referensi

Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan sektor i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total (PDRB) di wilayah referensi.

$$RPr = \frac{\Delta Y_{in}/Y_{in}(t)}{\Delta Y_n/Y_n(t)} \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan :

- ΔY_{in} = Perubahan PDRB sektor i di wilayah referensi (Provinsi Bali)
- $Y_{in}(t)$ = PDRB sektor i di wilayah referensi pada awal penelitian (Provinsi Bali)
- ΔY_n = Perubahan PDRB di wilayah referensi (Provinsi Bali)
- $Y_n(t)$ = PDRB di wilayah referensi pada awal penelitian (Provinsi Bali)
- RPr = Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan sektor ke-i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan pendapatan total (PDRB) kegiatan i di wilayah referensi (Provinsi Bali).

Analisis Overlay

Analisis *Overlay* bertujuan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria keunggulan komparatif (Suyana Utama, 2010). Hasil analisis *Overlay* memiliki empat prediksi yaitu:

- 1) $RP_s (+)$ dan $LQ (\geq 1)$ menunjukkan kegiatan suatu sektor sangat menonjol baik dari rasio pertumbuhan maupun keunggulan komparatif.
- 2) $RP_s (+)$ dan $LQ (\leq 1)$ menunjukkan kegiatan suatu sektor yang memiliki pertumbuhan menonjol namun tidak mempunyai keunggulan komparatif.
- 3) $RP_s (-)$ dan $LQ (\geq 1)$ menunjukkan kegiatan suatu sektor yang memiliki pertumbuhan kecil namun mempunyai keunggulan komparatif.
- 4) $RP_s (-)$ dan $LQ (\leq 1)$ menunjukkan suatu sektor yang tidak potensial dari kedua analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan model *Location Quotient (LQ)* untuk Kabupaten Bangli dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Analisis *Location Quotient (LQ)* Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Bangli Tahun 2013-2017

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.75	1.74	1.78	1.79	1.85	1.78
2. Pertambangan dan Penggalian	1.98	1.99	2.1	2.01	2.01	2.02
3. Industri Pengolahan	1.45	1.45	1.48	1.53	1.56	1.49
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.29	0.29	0.3	0.3	0.31	0.29
6. Konstruksi	0.8	0.8	0.81	0.82	0.83	0.81
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.14	1.15	1.14	1.14	1.12	1.14
8. Transportasi dan Pergudangan	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.59	0.59	0.6	0.58	0.58	0.58
10. Informasi dan Komunikasi	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.75
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.62	0.63	0.62	0.62	0.63	0.62
12. Real Estate	0.73	0.73	0.73	0.73	0.75	0.73
13. Jasa Perusahaan	0.51	0.51	0.51	0.51	0.5	0.50
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.17	2.17	2.12	2.11	2.13	2.14
15. Jasa Pendidikan	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.67	0.67	0.65	0.65	0.65	0.65
17. Jasa lainnya	1.81	1.81	1.82	1.83	1.84	1.82

Sumber: BPS Kab. Bangli dan Provinsi Bali, 2017

Dinamic Location Quention (DLQ) merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengukur peranan sektor usaha di masa yang akan datang.

Dimana prinsip dari analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)* tidak jauh

berbeda dengan teknik analisis untuk menentukan sektor basis atau non basis
yaitu analisis *Location Quotient* (LQ).

Tabel 5.

Hasil Analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)* Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Bangli Tahun 2013-2017

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.80	0.37	10.95	3.34	20.34	7.36
2. Pertambangan dan Penggalian	2.27	-1.8	2.23	1.84	3.35	1.12
3. Industri Pengolahan	3.72	1.44	3.24	19.26	25.30	10.59
4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.50	2.77	7.24	0.77	0.67	2.99
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.45	1.00	5.29	1.90	32.24	8.78
6. Konstruksi	3.01	0.30	2.17	3.12	1.84	2.09
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.52	1.18	0.67	0.99	0.47	1.17
8. Transportasi dan Pergudangan	2.93	9.85	66.59	0.01	0.30	15.93
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.47	1.12	0.21	0.21	0.89	0.78
10. Informasi dan Komunikasi	2.99	1.01	0.69	0.97	2.12	1.56
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.03	2.37	0.31	2.19	3.01	2.18
12. Real Estate	2.75	1.21	2.09	0.95	9.26	3.26
13. Jasa Perusahaan	2.81	1.20	1.04	2.08	0.24	1.48
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22.77	1.34	0.21	0.35	11.09	7.15
15. Jasa Pendidikan	2.48	1.36	0.86	1.05	0.78	1.31
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.29	1.39	0.17	1.26	0.94	1.21
17. Jasa lainnya	3.29	1.27	1.16	1.46	1.52	1.74

Sumber: BPS Kab. Bangli dan Provinsi Bali, 2017

Model Rasio Pertumbuhan merupakan suatu alat atau teknis analisis yang digunakan untuk membandingkan pertumbuhan pendapatan suatu sektor di wilayah yang lebih kecil dengan wilayah yang lebih besar. MRP ini digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi berpotensi atau unggul dibandingkan sektor ekonomi lain yang berada di Kabupaten Bangli.

Dalam perhitungannya Model Rasio Pertumbuhan dapat dianalisis dengan dua teknik yaitu :

Analisis ini dilakukan dengan melakukan perbandingan pertumbuhan pendapatan sektor ekonomi wilayah studi dengan referensi.

Deskripsi data

Perubahan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Bangli pada tahun 2013 hingga 2017 adalah sebesar Rp.175.106,18. PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Bangli tahun 2013 adalah sebesar Rp.873.105,14. Perubahan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi Bali tahun 2013 hingga 2016 adalah sebesar Rp.2.510.594,79 dan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi Bali tahun 2013 adalah sebesar Rp. 17.343.285.

Rumus RPs

$$RPs = \frac{175.106,18 / 873.105,14}{2.510.594,79 / 17.343.285}$$

$$RPs = 1.38 \text{ (dibulatkan)}$$

Analisis Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

$$RPr = \frac{2.510.594,79 / 17.343.285}{30.860.623,29 / 114.103.580,80}$$

$$RPr = 0.53 \text{ (dibulatkan)}$$

Sektor berpotensi atau unggul yang terdapat di beberapa sektor-sektor ekonomi yang ada di tiap wilayah dapat di analisis dengan Analisis Model Rasio Pertumbuhan. Sektor- sektor ekonomi yang berpotensi atau unggul dapat dipergunakan sebagai perbandingan penentuan arah pembangunan yang ada di Kabupaten Bangli. Berikut hasil analisis MRP dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten Bangli
Tahun 2013 - 2017

LAPANGAN USAHA	RPr	RP _s	Kode RPr	Kode RP _s	Interpretasi
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.53	1.38	(-)(<1)	(+)(>1)	Rendah pada wil.referensi dan menonjol pada wil.study
2. Pertambangan dan Penggalian	0.17	0.9	(-)(<1)	(-)(<1)	Rendah pada wil. Referensi dan study
3. Industri Pengolahan	0.79	1.37	(-)(<1)	(+)(>1)	Rendah pada wil referensi dan menonjol pada wil study
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.97	1.04	(-)(<1)	(+)(>1)	Rendah pada wil referensi dan menonjol pada wil study
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.72	1.27	(-)(<1)	(+)(>1)	Rendah pada wil referensi dan menonjol pada wil study
6. Konstruksi	0.86	1.14	(-)(<1)	(+)(>1)	Rendah pada wil referensi dan menonjol pada wil study
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.22	0.89	(+)(>1)	(-)(<1)	Menonjol pada wil referensi dan rendah pada wil study
8. Transportasi dan Pergudangan	0.95	1.03	(-)(<1)	(+)(>1)	Rendah pada wil referensi dan menonjol pada wil study
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.18	0.93	(+)(>1)	(-)(<1)	Menonjol pada wil referensi dan rendah pada wil study
10. Informasi dan Komunikasi	1.41	0.98	(+)(>1)	(-)(<1)	Menonjol pada wil referensi dan rendah pada wil study
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.03	1.04	(+)(>1)	(+)(>1)	Menonjol pada wil referensi dan study
12. Real Estate	0.9	1.12	(-)(<1)	(+)(>1)	Rendah pada wil referensi dan menonjol pada wil study
13. Jasa Perusahaan	1.16	0.89	(+)(>1)	(-)(<1)	Menonjol pada wil referensi dan rendah pada wil study
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.90	0.87	(-)(<1)	(-)(<1)	Rendah pada wil referensi dan study
15. Jasa Pendidikan	1.49	0.95	(+)(>1)	(-)(<1)	Menonjol pada wil referensi dan rendah pada wil study
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.62	0.89	(+)(>1)	(-)(<1)	Menonjol pada wil referensi dan rendah pada wil study
17. Jasa lainnya	1.32	1.03	(+)(>1)	(+)(>1)	Menonjol pada wilayah referensi dan study

Sumber: Data diolah, 2018

Analisis *Overlay* bertujuan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria keunggulan komparatif. Hasil analisis *Overlay* ini mencerminkan perbandingan antara nilai Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RP_s) dan nilai *Location Quotient* (LQ).

Hasil analisis *Overlay* dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Perhitungan Analisis *Overlay* di Kabupaten Bangli Tahun 2013 - 2017

LAPANGAN USAHA	RP _s	LQ	Kode RP _s	Kode LQ	Interpretasi
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.38	1.78	(>1)	(>1)	Pertumbuhan baik dan memiliki keunggulan komparatif.
2. Pertambangan dan Penggalan	0.9	2.02	(<1)	(>1)	Pertumbuhan rendah, namun memiliki keunggulan komparatif.
3. Industri Pengolahan	1.37	1.49	(>1)	(>1)	Pertumbuhan baik dan memiliki keunggulan komparatif.
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1.04	0.15	(>1)	(<1)	Pertumbuhan baik, namun tidak memiliki keunggulan komparatif.
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.27	0.29	(>1)	(<1)	Pertumbuhan baik namun tidak memiliki pertumbuhan komparatif.
6. Konstruksi	1.14	0.81	(>1)	(<1)	Pertumbuhan baik namun tidak memiliki keunggulan komparatif.
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.89	1.14	(<1)	(>1)	Pertumbuhan rendah namun memiliki keunggulan komparatif.
8. Transportasi dan Pergudangan	1.03	0.17	(>1)	(<1)	Pertumbuhan baik namun tidak memiliki keunggulan komparatif.
9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	0.93	0.58	(<1)	(<1)	Pertumbuhan rendah dan tidak memiliki keunggulan komparatif.
10. Informasi dan Komunikasi	0.98	0.75	(<1)	(<1)	Pertumbuhan rendah dan tidak memiliki keunggulan komparatif.
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.04	0.62	(>1)	(<1)	Pertumbuhan baik namun tidak memiliki keunggulan komparatif.
12. Real Estate	1.12	0.73	(>1)	(<1)	Pertumbuhan baik namun tidak memiliki keunggulan komparatif.
13. Jasa Perusahaan	0.89	0.50	(>1)	(<1)	Pertumbuhan rendah dan tidak memiliki keunggulan komparatif.
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.87	2.14	(<1)	(>1)	Pertumbuhan rendah namun memiliki keunggulan komparatif.
15. Jasa Pendidikan	0.95	0.44	(<1)	(<1)	Pertumbuhan rendah dan tidak memiliki keunggulan komparatif.
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.89	0.65	(<1)	(<1)	Pertumbuhan rendah dan tidak memiliki keunggulan komparatif.
17. Jasa lainnya	1.03	1.82	(>1)	(>1)	Pertumbuhan baik dan memiliki keunggulan komparatif

*Sumber:*BPS Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali , 2017

Tabel 8.
Rangkuman Hasil Penelitian PDRB Sektor-sektor Ekonomi di Kabupaten Bangli Tahun 2013 - 2017

LAPANGAN USAHA	LQ	DLQ	MRP	Nilai	Keterangan
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(>1)	(>1)	(<1) (>1)	3	Prioritas pembangunan kedua
2. Pertambangan dan Penggalian	(>1)	(>1)	(<1) (<1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
3. Industri Pengolahan	(>1)	(>1)	(<1) (>1)	3	Prioritas pembangunan kedua
4. Pengadaan Listrik dan Gas	(<1)	(>1)	(<1) (>1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(<1)	(>1)	(<1) (>1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
6. Konstruksi	(<1)	(>1)	(<1) (>1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(>1)	(>1)	(>1) (<1)	3	Prioritas pembangunan kedua
8. Transportasi dan Pergudangan	(<1)	(>1)	(<1) (>1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(<1)	(<1)	(>1) (<1)	1	Prioritas pembangunan keempat
10. Informasi dan Komunikasi	(<1)	(>1)	(>1) (<1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	(<1)	(>1)	(>1) (>1)	3	Prioritas pembangunan kedua
12. Real Estate	(<1)	(>1)	(<1) (>1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
13. Jasa Perusahaan	(<1)	(>1)	(>1) (<1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(>1)	(>1)	(<1) (<1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
15. Jasa Pendidikan	(<1)	(>1)	(>1) (<1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(<1)	(>1)	(>1) (<1)	2	Prioritas pembangunan ketiga
17. Jasa lainnya	(>1)	(>1)	(>1) (>1)	4	Prioritas pembangunan pertama

Sumber: BPS Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali, 2017

Sektor potensial di kabupaten Bangli dapat dianalisis dengan menggunakan analisis *Overlay*. Berdasarkan hasil analisis *overlay*, diperoleh beberapa sub sektor yang potensial di Kabupaten Bangli. Dimana sektor-sektor ini memiliki

dominan pertumbuhan yang baik serta memiliki keunggulan komparatif. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor jasa lainnya, ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang berpotensi/potensial di Kabupaten Bangli. Di Kabupaten Bangli dalam Angka 2013, produksi komoditi sayuran tertinggi mencapai 22.853 ton pada sayur kubis, dan produksi komoditi buah tertinggi mencapai 119.030 ton pada buah jeruk. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor primer utama yang mendukung perekonomian di Kabupaten Bangli. Selain sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan jasa lainnya juga berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli.

Sektor basis di suatu wilayah dapat diketahui dengan menggunakan dua alat analisis yakni *Location Quotient*. Berdasarkan hasil analisis LQ, diketahui bahwa di Kabupaten Bangli tahun 2013-2017 terdapat 6 sektor basis diantaranya : sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 1.78, pertambangan dan penggalian 2.01, industri pengolahan 1.49, perdagangan besar dan eceran 1.14, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 2.14, dan yang terakhir jasa lainnya sebesar 1.82.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor basis di Kabupaten Bangli. Dilihat dari hasil analisis LQ dan Bangli dalam angka bahwa serktor pertanian masih menunjang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangli. Hasil sub sektor pertanian yang ada di kabupaten Bangli seperti komoditi buah-buahan dan sayur-sayuran. Hasil kehutanan yang ada di Kabupaten Bangli

berupa bambu, sengon dan jati. Hasil perikanan yang ada di Kabupaten Bangli berupa ikan nila dan ikan lele.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor basis di Kabupaten Bangli. Lokasi kawasan pertambangan galian C terutama di Kawasan Yeh Mampeh pada dasar kaldera Batur. Produknya berupa batu dan pasir.

Sektor Industri pengolahan merupakan sektor basis di Kabupaten Bangli. Menurut info Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bangli, menerangkan bahwa untuk sektor industri yang berkembang di Kabupaten Bangli berupa industri kerajinan bambu sebagai ikon produksi kerajinan Kabupaten Bangli, industri pengolahan bahan makanan potensi sumber daya perkebunan yang ada seperti kopi, jeruk, buah-buahan, industri pengolahan bahan setengah jadi, untuk produksi barang kerajinan dari bahan hasil kehutanan (kayu), dan industri kreatif terkait *production house* atau *software* mengingat kawasan sekitar Danau Batur mampu memberikan suasana segar untuk pengembangan keilmuan yang ditunjang teknologi komunikasi yang handal.

Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor basis di Kabupaten Bangli karena memiliki nilai $LQ > 1$. Sektor perdagangan besar dan eceran memiliki peran dalam menunjang pertumbuhan perokonomian di Kabupaten Bangli. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangli 2017, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangli menurut lapangan usaha tahun 2013-2017, jasa perdagangan besar dan eceran kontribusinya mencapai 6.35% di tahun 2017.

Sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial merupakan sektor basis di Kabupaten Bangli, karena sektor ini memiliki nilai $LQ > 1$. Seluruh

kegiatan pemerintahan seperti pengambilan keputusan, arah kebijakan dan kegiatan administratif lainnya. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangli menurut lapangan usaha tahun 2013-2017, kontribusi sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan social wajib mencapai 10.02% pada tahun 2014.

Sektor jasa lainnya merupakan sektor basis di Kabupaten Bangli, karena sektor ini memiliki nilai $LQ > 1$. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang baik, dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangli menurut lapangan usaha tahun 2013-2017, laju pertumbuhannya mencapai 8% di tahun 2017, ini berarti bahwa sektor jasa lainnya ikut berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli.

Selain sektor basis di atas, adapun sektor non basis di Kabupaten Bangli diantaranya sektor pengadaan listrik dan gas nilai LQ nya < 1 yakni 0.15, sektor pengadaan air 0.29, sektor kontruksi 0.81, sektor transportasi dan pergudangan 0.17, sektor penyedia akomodasi 0.58, sektor informasi dan komunikasi 0.75, sektor jasa keuangan dan asuransi 0.62, sektor real estate 0.73, sektor jasa perusahaan 0.50, sektor jasa pendidikan 0.44, sektor jasa kesehatan dan kegiatan social 0.65.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang unggul dan berpotensi dapat dikembangkan di Kabupaten Bangli, dengan perencanaan yang tepat demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan teoriperencanaan pembangunan daerah yang merupakan suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses

penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 sektor basis yang tepat untuk dikembangkan di Kabupaten Bangli diantaranya: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, dan sektor jasa lainnya. Dimana keenam sektor ini merupakan basis dari pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangli.

Berdasarkan hasil analisis *Overlay*, terdapat 3 sektor potensial di Kabupaten Bangli yang memiliki pertumbuhan yang baik serta berkeunggulan komparatif diantaranya : sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor jasa lainnya. Berdasarkan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), terdapat 2 sektor basis diantaranya sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor jasa lainnya.

Penelitian selanjutnya dapat meneliti kembali dengan menggunakan variable-variabel-variabel lain yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mengukur dan menganalisis sektor-sektor ekonomi yang unggul dan berpotensi untuk dikembangkan.

Bagi masyarakat dan petani setempat diharapkan dapat mengembangkan sektor-sektor yang sudah menjadi icon dari Kabupaten Bangli dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang telah berkembang saat ini, seperti contoh mencari ilmu-ilmu baru dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bangli lewat situs-situs resmi atau dapat diakses pada situs Google sebagai penyedia informasi. Dengan demikian akan lebih maju perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bangli

Guna tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, disini diperlukan campur tangan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dan bagaimana arah kebijakan yang harus dilakukan. Pemerintah perlu melakukan pembenahan dari pembenahan infrastruktur sebagai penunjang dasar terciptanya proses pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang ada di Kabupaten Bangli. Serta pemerintah perlu lebih banyak melaksanakan pelatihan-pelatihan guna membedayakan sumber daya manusia atau masyarakat umum guna terciptanya optimalisasi pertumbuhan ekonomi, dimana SDM ini sebagai motor penggerak perekonomian wilayahnya. Dan yang terakhir pemerintah perlu mengoptimalkan regulasi agar proses perencanaan pembangunan dan tujuan visi dan misi dapat terlaksana, terarah tanpa adanya hambatan- hambatan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dari hasil penelitian diatas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan sektor dengan pertumbuhan yang rendah di wilayah study, maka bagaimana peran pemerintah disini untuk lebih memperhatikan tentang pengadaan air dan sektor-sektor penting penunjang pembangunan utama.

REFERENSI

- Ann Hodgkinson. 2005. Location Quotients And Shift-Share Analysis : A Low Cost Approach To Regional Development Planning. *Faculty Of Commerce Papers University Of Wollongong*, Australia
- Afzal, M. 2007. The Impact Of Globalization On Economic Growth Of Pakistan. The Pakistan And Economic Growth In Ghana. *International Research Journal Of Finance And Economic*. Pp 723-734
- Arafah Willy, Ryan Corinus Dato Matheos. 2017. Determining Factors of Potential Economy Sectors of Bantaeng Regency in South Sulawesi Province of Indonesia: An Analysis Using the Location Quotient Approach. *International Journal of Business and Management*, Vol. 12, No. 7; 2017.
- Arsenio M. Balisacan, Ernesto M. Pernia, dan Abuzar Asra. 2003. Revisiting growth and poverty reduction in Indonesia: what do subnational data show? *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Volume 39, 2003-Issue 3.
- Artana Yasa, I Komang Oka dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.8 No.1
- Ariyasa, I.B.W. 2009. Identifikasi Sektor/Subsektor Potensial Untuk Menentukan Prioritas Pembangunan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali (Tesis). Denpasar : Universitas Udayana
- A.Z. Nowak and Gangadhar Dahal. 2016. The Contribution Of Education To Economic Growth: Evidence From Nepal. *International Journal of Economic Sciences*, Vol. V, No. 2.
- Badan Pusat Statistik.2017. Kabupaten Bangli Dalam Angka 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Provinsi Bali Dalam Angka 2017.
- Bambang Prishardoyo.2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomiterhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. *JEJAK*, Volume 1, Nomor 1, September, 2008

- Budhi, Made Kembar Sri. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol 6 No.1 Febuari 2013.
- Dewi Ardhiyanti, Ni Luh Putu. 2016. Trend Angka Morbiditas di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9 No.2.
- Erawati, N. K., & Nyoman Mahendra Yasa. 2012. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 1 no: 1 tahun 2012.
- Fattah Sanusi, Abdul Rahman. 2013. Analysis of Regional Economic Development in the Regency/Municipality at South Sulawesi Province In Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Volume. 14, No.1.
- Fitria Fitriani, Bert Hofman dan Kai Kaiser^a · 2005. Unity In Diversity?The Creation Of New Local Governments In A Decentralising Indonesia. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 41, No. 1, 2005: 57-79
- Gemechis D. Djira, Frank Schaarschmitd, And Bichaka Fayissa. 2008. Inferences For Selected Location Quotient With Applications To Health Outcomes. *Department Of Economics Dan Finance Working Papers Series, Middle Tennessee State University*, Series 2008.
- Glimer R W, Keil S. R, And Mack R. S . 1989. The Location Quotient And Central Place Theory. *Federal Reserve Bank Of Dallas*, No. 8916.
- Harendhika Lukiswara. 2016. Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem Lunak di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol. 2 No. 4 (2016) 216-226.
- Indah Utami Dewi, Ida Ayu, Made Kembar Sri Budhi dan Wayan Sudirman. 2014. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.
- Kesuma Aprilia, Ni Luh. Dan Made Suyana Utama 2015. Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 [1.], hal :100-107.
- Lely Indah, Anggraeny Puspaningtyas, and Siti Rochmah. 2013. Analysis Of Local Economic Potential And Competitiveness Economic Sector In Improving Local Economic Development (Study In Batu City). *Journal Administration Publik (JAP)*, Vol 3, No.1, h. 151-156.
- Maryann Feldman, Theodora Hadjimichael and Lauren Lanahan. 2016. The Logic Of Economic Development: A Definition And Model For Investment. *Journal Environment and Planning C: Government and Policy 2016*, volume 34, pages 5 – 21.

- Mika Launingtiyas. 2016. Analisis Pembangunan Daerah Berbasis Sektor Unggulan Dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015).
- Nyasha Mahonye, Leonard Mandishara. 2015. Mechanism Between Mining Sector And Economic Growth In Zimbabwe, Is It a Resource Curse?. *Journal Environmental Economics*, Volume 6, Issue 3, 2015.
- Pramita Purwanti, Putu Ayu. 2009. Analisis Kesempatan Kerja Sektoral Di Kabupaten Bangli Dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor. *Jurnal Piramida*, Vol : 5 No.1
- Rowena A. Dorado. 2014. Estimating the Potential of the Economic Sectors of Lipa City, Batangas, Philippines as a Source of Growth. *Journal of Global Business and Trade*, Vol. 11 No. 2 (November 2014), 51-60. (Halaman : 22)
- Robi Kurniawan, Shunsuke Managi. 2018. Economic Growth And Sustainable Development In Indonesia: An Assessment. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*. ISSN: 0007-4918.
- Spolaore, Enrico.and Romain Wacziarg.2013.How Deep Are The Roots Of Economi Development. *Journal Of Economic Literature* 51.2.pp:325369.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh (Alih Bbu*ULahasa Oleh Drs. Haris Munandar, M. A), Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wen-Tai HSU. 2011. Central place theory and city size distribution. *Economic Journal*. 122, (563), 903-932. Research Collection School Of Economics.
- Wika Mandala, Warsita; A.A.IN Marhaeni.2015. Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan Ibu, Dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Angka Kematian Bayi Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, Vol. XI No. 1 : 35-41
- Wiwekananda, Ida Bagus Putu; Suyana Utama, I Made. Transformasi Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Buleleng Periode 20082013. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], july 2016.
- Winda Savitri Dewi, Ni Made, dan I Nyoman Mahaendra Yasa. 2018. Analisis Sektor Potensial Dalam Menetapkan Pembangunan di Kabupaten Karangasem.*E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.7,No.1